

**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Muzanni Ali, S.E.  
selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah  
Kota Bandar Lampung  
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung  
(Selasa, 20 Mei 2014)**

## HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI  
ELEKTRONIK (KPE)

### **Fokus pada Implementor (BKD)**

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung?

Jawab : Setahu saya yang menjadi tujuan utama diberlakukannya KPE adalah perubahan dari Kartu Pegawai (KARPEG) ke KPE, artinya menggunakan teknologi informasi dalam bentuk KPE dalam pelayanan dibidang kepegawaian, selain itu juga perubahan pola pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil melalui layanan perbankan.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : Sejauh ini BKD selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta terkait Prosedur Administrasi yang sesuai dengan peraturan kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan?

Jawab : Ya tentu saja, dalam proses pembuatan KPE, PNS diharuskan melengkapi prosedur- prosedur seperti harus mengumpulkan SK pangkat terakhir dan foto copy KTP yang bersangkutan.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Yang selama ini saya rasakan, kendala yang dihadapi BKD antara lain seperti sulitnya berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait informasi tentang KPE sehingga banyak PNS pengguna KPE terutama PNS Guru yang tertinggal informasi KPE.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya sepanjang sepengetahuan kami sekitar  $\pm$  3 kali BKD melayangkan surat pemberitahuan tentang proses pemfotoan KPE yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Saya agak kurang memahami bagaimana proses koordinasi dengan pihak BKN, mungkin untuk lebih detailnya bisa anda tanyakan kepada KASUBAG Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi BKD karena disini saya selaku KASUBAG Umum kurang terlibat jauh.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Ya sepengetahuan saya BKN rutin melakukan kunjungan kerja ke BKD Kota Bandar Lampung untuk melihat sejauh mana proses pemfotoan KPE berlangsung.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Setahu saya, sampai dengan saat ini pemerintah Bandar Lampung belum melakukan kerja sama dengan pihak ke-3.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan Pihak ke-tiga?

Jawab : Kendala yang kami hadapi saat ini mungkin kurangnya inisiatif dari atasan dalam hal ini walikota Bandar Lampung untuk segera menunjuk pihak ke-3.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Sudah tiga Kali.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Ya dari beberapa fungsi utama kartu pegawai elektronik sebagian besar belum dimanfaatkan dengan maksimal, selama ini yang hanya sebatas pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) sebagai kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : Ya sepertinnya masih belum tercapai.

### **Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)**

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Ya kalau menurut saya sudah cukup. Sumber daya yang ada di BKD baik itu manusianya maupun teknologi-nya sudah cukup memadai.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) di BKD sudah didukung oleh lulusan perguruan tinggi sampai dengan lulusan Magister atau S2.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Iya sudah sejauh ini sudah dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah tiap tahunnya.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya sudah, ini kita lakukan melalui surat yang kita kirim melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Ya selain melalui surat tadi yang saya jelaskan, BKD juga membuka Loker Pelayanan Informasi tentang KPE, sehingga PNS yang merasa membutuhkan informasi bisa memperoleh kejelasan.

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Surat dan Loker Pelayanan Informasi tentang KPE selain itu juga melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian untuk mensosialisasikan KPE kepada PNS.

7. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, yang saya rasakan adalah kurang profesional nya pihak skofindo yang menjadi rekanan BKN dalam implementasi KPE di kota Bandar Lampung.

8. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya semua proses pemfotoan dilakukan oleh PT. Sucofindo.

9. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Iya tinggal PNS yang bersangkutan datang langsung ke BKD, Staff BKD akan memberikan informasi yang dibutuhkan.

10. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Iya, BKD menyiapkan Loker Pelayanan Informasi tentang KPE.

11. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?

Jawab : Iya sejauh ini banyak PNS menanyakan informasi tentang KPE ke BKD.

12. Bagaimana *political will* Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Sejalan ini Walikota memerintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS kota Bandar Lampung.

13. Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, selama ini kami lakukan adalah segera menyelesaikan proses pemfotoan KPE bagi PNS yang belum memiliki KPE.

14. Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Iya, selalu berkoordinasi dengan BKN dan menyelesaikan proses pengambilan data bagi PNS yang belum memiliki KPE.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Sejauh ini cukup antusias, bisa dilihat dari proses pemfotoan KPE yang dihadiri banyak PNS di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung.